



## Kinerja Implementasi Kebijakan Program Si Eling (Promosi Dan Edukasi Kesehatan Keliling) Tentang HIV Di Kota Bandung Pada Tahun 2022-2023 (Studi Pada Dinas Kesehatan Kota Bandung)

Patna Akbar Pangestu<sup>1)</sup>, Ivan Darmawan<sup>2)</sup>, Antik Bintari<sup>3)</sup>

Universitas Padjajaran, Indonesia

[patna20001@mail.unpad.ac.id](mailto:patna20001@mail.unpad.ac.id)<sup>1)</sup>

[ivan.darmawan@unpad.ac.id](mailto:ivan.darmawan@unpad.ac.id)<sup>2)</sup>

[a.bintari@unpad.ac.id](mailto:a.bintari@unpad.ac.id)<sup>3)</sup>

### Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi Program Si Eling oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung sebagai bagian dari upaya promosi dan edukasi kesehatan terkait HIV/AIDS. Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, penelitian ini menganalisis enam dimensi untuk mengukur efektivitas program, termasuk ukuran kebijakan, sumber daya, dan komunikasi antar organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program memiliki dampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HIV/AIDS, terdapat kekurangan dalam kontinuitas dan cakupan yang menyebabkan dampaknya kurang optimal. Dengan kendala pada sumber daya dan manajemen waktu, disarankan agar program ini diperluas dan diperkuat dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan kesehatan masyarakat yang lebih efektif.

**Kata kunci:** Implementasi kebijakan, Si Eling, HIV/AIDS, Dinas Kesehatan, Kota Bandung

### Abstract

*This study examines the implementation of the Si Eling Program by the Bandung City Health Office as part of health promotion and education efforts related to HIV/AIDS. Using Van Meter and Van Horn's policy implementation theory, this research analyzes six dimensions to assess the program's effectiveness, including policy size, resources, and inter-organizational communication. The findings indicate that although the program positively impacts public awareness of HIV/AIDS, its continuity and coverage are limited, resulting in suboptimal outcomes. Faced with resource and time management constraints, it is recommended that the program be expanded and strengthened to achieve more effective public health goals.*

**Key words:** Policy implementation, Si Eling, HIV/AIDS, Health Office, Bandung City

### PENDAHULUAN

Kesehatan di Indonesia sangat dinamis, dengan intensitas pelayanan kesehatan yang sering meningkat. Situasi ini menuntut elemen kesehatan dan kebijakan untuk adaptif, fleksibel, efektif, dan efisien. Dinamika kesehatan tidak bisa diprediksi secara pasti. Contohnya adalah wabah Covid-19 yang meluluhlantakkan sektor ekonomi, pemerintahan, pelayanan publik, transportasi, dan banyak lainnya. Pemerintah dan pihak terkait harus selalu siap menghadapi perubahan mendadak dalam sektor kesehatan. Adapun segmentasi yang selalu diliput setiap tahun dalam konteks kesehatan di Indonesia yaitu perihal permasalahan yang selalu menjadi isu



hangat yang tabu dan menjadi ketakutan tinggi bagi masyarakat ialah perihal virus HIV dan penyakit AIDS atau secara sederhananya suatu penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. Penyakit AIDS tersebut dapat menjangkiti seseorang melalui virus yang kita kenal sebagai HIV dan adapun cara penularannya diantaranya ialah hubungan seksual vaginal dan anal, penggunaan jarum suntik, dan transfuse darah. Lalu, pengidap AIDS memiliki probabilitas tinggi untuk menularkan penyakit AIDS tersebut kepada anak yang dikandungnya pada saat masa kehamilan, melahirkan, dan menyusui.

Secara nasional terutama dari perspektif pemerintahan tentunya penyakit AIDS merupakan salah satu dari sekian penyakit yang perlu difokuskan dan diberi perhatian lebih. Karena, urgensitasnya yang tinggi dan juga dampak yang disebabkan sangat destruktif dan dapat memantik kepanikan publik. Maka, sudah menjadi kewajiban Pemerintah Pusat untuk menjamin kesehatan dan kelayakan hidup masyarakat Indonesia. Sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 11 menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan dan akses terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta informasi dan edukasi Kesehatan. Berlanjut dari bagian tersebut, pada kebijakan yang sama, terdapat tanggung jawab pemerintah yang memiliki tujuan untuk mewujudkan dan menjaga segala hal yang bersangkutan dengan kesehatan secara konkret dan pasti.

Menurut Kementerian Kesehatan melalui laman resminya yaitu Sehat Negeriku menyatakan bahwasanya jumlah penularan HIV pada tahun 2023 berada pada angka 526.841 orang dengan HIV. Namun, hanya 429.215 orang yang sudah terdeteksi. Maka, sekitar 100.000 orang dengan HIV belum menyadari bahwasanya dirinya tertular HIV dan berpotensi dapat tertularkan kepada masyarakat lainnya. Adapun kasus dan fakta temuan lainnya yang dimana penularan HIV menurut Kementerian Kesehatan sedang marak melalui ibu rumah tangga yang terinfeksi, suami pekerja seks, dan kelompok MSM (*man sex with man*) dan untuk segmen ibu rumah tangga pada tiap tahunnya meningkat jumlah terinfeksi sebanyak 5100 per tahun. Lalu, adapun temuan bahwasanya ada kasus HIV pada anak usia 1-14 tahun mencapai 14.150 kasus dan angka tersebut tiap tahunnya bertambah sekitar 700-1000 anak dengan HIV.

Dengan fakta-fakta dan temuan tersebut bukan tidak heran apabila di Indonesia pemerhatian terhadap penyebaran HIV dan penanganan penyakit AIDS perlu dan wajib untuk ditingkatkan dan menjadi prioritas dalam penanganan kesehatan secara nasional. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah pun turut berperan untuk menangani isu ini yang dapat dilihat dari adanya kebijakan spesifik terkhusus mengenai isu virus HIV dan penyakit AIDS seperti yang dilakukan oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang membuat kebijakan yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS yang didalamnya secara komprehensif menjelaskan terkait upaya-upaya dan aturan fundamental bagi wilayah Provinsi Jawa Barat dalam menyikapi, mencegah, dan menanggulangi isu HIV dan AIDS secara konkret di Provinsi Jawa Barat.

Sejalan dengan isi kebijakan dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dan Penanggulangan HIV yang akan dikaji implementasi kebijakannya, alangkah baiknya memahami dahulu kandungan yang relevan dengan konteks yang akan dikaji yaitu utamanya ialah pada BAB II tentang Maksud, Tujuan, dan Sasaran pasal 3 ayat (d) yang menyebutkan bahwa Pengaturan pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan penanggulangan HIV/AIDS, bertujuan untuk menurunkan hingga meniadakan penularan infeksi HIV baru dan juga pada BAB III tentang Ruang Lingkup Bagian Kedua yaitu Penanggulangan HIV/AIDS pada Pasal 6 yang berisikan bahwasanya ruang lingkup pengaturan penanggulangan HIV/AIDS secara komprehensif dan berkesinambungan, terdiri atas: a) promosi kesehatan; b) pencegahan penularan HIV/AIDS; c) pemeriksaan dan diagnosis HIV; d) pengobatan, perawatan, dan dukungan; e) rehabilitasi sosial terhadap individu, keluarga, dan masyarakat; f) peran serta masyarakat.

Dengan adanya kebijakan tersebut tentunya menjadi landasan fundamental yang sah dan

pasti bahwasanya Pemerintah Daerah dari tingkatan Provinsi Jawa Barat hingga Pemerintah Daerah Kota Bandung memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk fokus dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung. Program Si Eling atau Promosi dan Edukasi Kesehatan Keliling ini pada tahun 2022 lalu menyasar setidaknya 12 titik dengan topik pembahasan terkait virus HIV dan penyakit AIDS. Pada saat itu, tepatnya pada bulan September 2022 program Si Eling menyambangi 1 Sekolah Dasar dan 11 Sekolah Menengah Pertama Program Si Eling dimulai pada Senin, 5 September 2022, di SDN 076 Sukajadi dan dilanjutkan ke SMP Santa Ursula sebagai titik kedua. Pada tahun 2022 pun program Si Eling Garapan Dinas Kesehatan Kota Bandung ini pun menargetkan akan menyambangi total 12 titik yang dimana komposisinya ialah 11 Sekolah Menengah Pertama dan 1 Sekolah Dasar. Adapun harapan dari kegiatan program ini dapat dikembangkan secara berkala dan kedepannya tidak hanya membahas tentang HIV dan AIDS saja. Namun, kesehatan secara komprehensif dan merata kepada anak muda di Kota Bandung. Adapun respon dari Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama Santa Ursula Bandung yaitu Lucia Ika yang menyatakan bahwasanya program ini sangatlah positif karena menjadi unsur pemantik proteksi terhadap pola pikir siswa-siswi untuk mencegah penularan HIV dan AIDS sejak dini.

Disisi lain, dengan adanya manifestasi implementasi kebijakan belum berarti bahwasanya seluruh aspek implementatif tersebut memenuhi tiap dimensi implementasi kebijakan yang tepat. Karena, terdapat temuan lainnya mengenai program Si Eling ini ialah kejelasan dalam langkah implementatifnya dirasa kurang jelas dan juga *output* yang dihasilkan pun terlalu tersegmentasi dan tidak menjangkau banyak elemen. Walaupun, dalam tujuan awalnya ialah kepada siswa-siswi, namun jumlah di siswa-siswi di Kota Bandung sangatlah banyak. Salah satu contoh dari ketidakjelasan program ini adalah banyaknya SD dan SMP yang dikunjungi oleh pihak Dinas Kesehatan, menurut data pokok pendidikan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan terdapat 484 SD dan 273 SMP di Kota Bandung hal ini berarti Dinas Kesehatan hanya dapat menjangkau 0,207% untuk SD dan 4,44% untuk SMP yang ada di Kota Bandung, selain dari itu pada awal hingga akhir tahun 2022 peningkatan kasus HIV/AIDS meningkat secara drastis yaitu mencapai angka 2.428 orang. Maka, timbul banyak sekali pertanyaan mengenai apakah salah satu manifestasi implementasi kebijakan ini telah memenuhi kodratnya atau urgensi program ini diciptakan atau belum. Karena, secara konkret tidak ditemukan esensi implementatif yang layak dan sejalan dengan dimensi teori implementasi kebijakan dalam program manifestasi kebijakan ini.

Maka dari itu, pada riset ini ditujukan untuk mengkaji secara komprehensif terkait implementasi kebijakan atas manifestasi kebijakannya berupa program Si Eling menggunakan teori hasil pemikiran dari Van Meter dan Van Horn yang merumuskan teori untuk implementasi kebijakan yang dari hasil pemikirannya terdapat 6 (enam) dimensi teori yang akan digunakan kelak untuk mengupas tuntas terkait implementasi kebijakan program Si Eling di Kota Bandung. Adapun keenam dimensi tersebut, yaitu: a) ukuran dan tujuan kebijakan; b) sumber daya; c) karakteristik agen pelaksana; d) sikap atau kecenderungan (*disposition*) para pelaksana; e) komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana; f) lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

## METODE

Metode kualitatif yang bersifat deskriptif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami suatu situasi sosial, peristiwa dan peran. Dalam riset ini, dilakukan pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh informasi dan fakta yang valid, peneliti menggunakan pengumpulan data melalui sumber primer dan sekunder, dimana peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan cara studi pustaka dan studi lapangan. Penentuan informan melalui kriteria a) Informan tersebut harus memiliki pengetahuan tentang gambaran terhadap objek riset, b) Informan tersebut harus memiliki pengetahuan dan perhatian terhadap permasalahan di lapangan, c) Adanya kesanggupan informan untuk menerima riset dan memberikan keterangan secara terbuka dan apa adanya (Arikunto 2010:16). Menurut (Sugiyono 2013:274) terdapat teknik triangulasi yang terbagi ke dalam a). Triangulasi



Sumber, b). Triangulasi Teknik, dan c). Triangulasi Waktu. Dalam riset ini, peneliti menggunakan tiga teknik analisis data untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis data, adapun tiga teknis tersebut sejalan dengan analisis menurut Miles dan Huberman (1992) dalam Sugiyono (2013) yakni Reduksi Data (*Data Reduction*); Penyajian Data (*Data Display*), dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Program Si Eling di Kota Bandung oleh Dinas Kesehatan harus mencerminkan kebijakan kesehatan yang hierarkis dari pusat ke daerah. Upaya promosi dan edukasi kesehatan, terutama mengenai isu HIV dan AIDS, memerlukan kajian dan pertimbangan matang untuk menjadi solusi bagi masyarakat. Menurut Van Meter dan Van Horn, keberhasilan implementasi kebijakan diukur dari realisme ukuran dan tujuan kebijakan dengan konteks sosio-kultural pelaksana. Kebijakan harus sesuai dengan situasi, kondisi, dan kapasitas pelaksana agar dapat diterapkan secara optimal dan memberikan dampak positif bagi kualitas hidup masyarakat.

Aspek ukuran dan cakupan kebijakan Program Si Eling di Kota Bandung melibatkan wawancara dengan Ibu Nilla Avianty, Ketua Tim Kerja Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat. Program ini direncanakan selama 9 bulan dengan fokus pada peningkatan kesehatan individu dan masyarakat di Kota Bandung. Meskipun memiliki tujuan positif, narasumber dari SMPN 2 Bandung, Ibu Leni Agustini, mengungkapkan perlunya keberlanjutan program agar edukasi tentang isu HIV dan AIDS tidak hanya dilakukan sekali. Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Andreas William dari SMPK Kalam Kudus, yang menilai program baik, namun mengharapkan kontinuitas dalam edukasi terkait isu kesehatan lainnya. Kesimpulannya, meskipun konsep dasar Program Si Eling positif, ada kekurangan dalam hal dampak dan keberlanjutan implementasinya.

Aspek tujuan kebijakan dan sasaran Program Si Eling di Kota Bandung didasarkan pada kebutuhan untuk memiliki parameter yang jelas dalam menilai keberhasilan program. Menurut Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, tujuan program ini adalah meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas petugas dalam memberikan informasi kesehatan kepada masyarakat.

Ibu Nilla Avianty, sebagai ketua program, menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu kesehatan, termasuk HIV, AIDS, dan Kawasan Tanpa Rokok, dengan pendekatan edukasi langsung. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat mendapat pemahaman yang baik tentang pentingnya kesehatan. Pendapat dari Ibu Leni Agustini, S.Pd. dari SMPN 2 Bandung, menekankan bahwa tujuan program ini jelas dan positif, memudahkan masyarakat mendapatkan edukasi kesehatan. Bapak Andreas William dari SMPK Kalam Kudus menyoroti pentingnya konsistensi dan komitmen dalam pelaksanaan program, karena dinamika yang dihadapi bisa bervariasi. Ia mengingatkan bahwa program yang baik harus diimplementasikan secara optimal untuk memenuhi tujuan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Secara keseluruhan, meskipun tujuan program Si Eling sangat positif, keberlanjutan dan konsistensi dalam pelaksanaannya menjadi kunci untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Program Si Eling memiliki indikator keberhasilan yang jelas, antara lain:

- 1) 100% kelurahan lokus stunting di Kota Bandung mendapatkan promosi dan edukasi kesehatan terkait pencegahan stunting.
- 2) Minimal 80% ibu hamil di kelurahan lokus stunting mengetahui pentingnya pengukuran LILA dan konsumsi tablet tambah darah.
- 3) Kerjasama dengan 80 UPT Puskesmas untuk promosi kesehatan keliling tentang pencegahan Covid.
- 4) Kemitraan dengan berbagai organisasi dan komunitas untuk mendukung inovasi program.

Ibu Nilla Avianty menjelaskan bahwa indikator ini sudah ditetapkan, namun kegiatan edukasi tentang HIV, AIDS, dan Kawasan Tanpa Rokok merupakan respons reaktif terhadap isu kesehatan yang sedang berkembang. Meskipun ada indikator yang jelas, pelaksanaan program lebih bersifat sporadis, yang dapat memengaruhi efektivitas dan keberlanjutannya. Pendapat dari

pihak sekolah menunjukkan pandangan beragam tentang keberhasilan program. Ibu Dea Anggi Permana dari SMP Ma'arif menyatakan bahwa program ini berhasil dilaksanakan, namun dampaknya tidak bertahan lama karena kurangnya kontinuitas dan tidak menjangkau mayoritas peserta didik. Sementara Ibu Edi Widiawati dari SMPN 31 merasa program cukup berhasil, tetapi menekankan perlunya keberlanjutan dan rencana jangka panjang untuk mengedukasi generasi yang terus berganti.

Secara keseluruhan, meskipun program Si Eling terealisasi dengan baik, terdapat kekurangan dalam dampak jangka panjang dan keberlanjutan, yang membuat pelaksanaannya terasa kurang optimal dan tidak menyeluruh.

Pelaksanaan Program Si Eling di Kota Bandung menghadapi berbagai tantangan dan kendala, sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Nilla Avianty, Ketua Tim Kerja Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat. Ia menekankan pentingnya intensitas dan responsivitas program dalam memberikan edukasi tepat waktu kepada masyarakat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena program harus siap menghadapi isu kesehatan yang terus berkembang, sehingga informasi yang disampaikan relevan dan dapat langsung diterapkan.

Ibu Dea Anggi Permana dari SMP Ma'arif menambahkan bahwa tantangan terbesar adalah konsistensi dalam menjalankan program. Ia menekankan perlunya Dinas Kesehatan untuk terus berinovasi dan menyesuaikan metode edukasi agar dapat menjangkau setiap lapisan masyarakat secara efektif. Ibu Edi Widiawati dari SMPN 31 juga menggarisbawahi pentingnya fokus dan jangka panjang dalam pelaksanaan program. Ia menyarankan agar dibuat tim kecil yang lebih terfokus pada isu-isu tertentu, sehingga pelaksanaan program bisa lebih efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, meskipun landasan program Si Eling cukup baik, eksekusi di lapangan dirasa kurang optimal. Program ini tidak menjangkau seluruh sekolah di Bandung, dengan fokus isu yang terlalu terpecah. Keberdampakan dan keberlanjutan program juga belum tampak konkret, meninggalkan pertanyaan tentang kejelasan arah dan efektivitasnya di masa mendatang.

Pada variabel sumber daya, penting untuk membahas elemen-elemen teknis yang mendukung Program Si Eling, termasuk sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, dan manajemen waktu. Dinas Kesehatan Kota Bandung perlu mengalokasikan sumber daya yang memadai mengingat intensitas kegiatan promosi dan edukasi kesehatan yang tinggi.

- 1) Sumber Daya Manusia: Ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman sangat penting untuk menjalankan program secara efektif. Ini mencakup tim yang mampu menyampaikan informasi dengan baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- 2) Anggaran: Sumber daya finansial yang cukup diperlukan untuk mendukung berbagai kegiatan, termasuk penyediaan alat edukasi, transportasi, dan pelatihan bagi petugas.
- 3) Sarana Prasarana: Infrastruktur yang memadai, seperti kendaraan untuk edukasi keliling dan fasilitas pendukung lainnya, sangat penting untuk mencapai masyarakat secara efektif.
- 4) Manajemen Waktu: Pengaturan jadwal yang baik untuk kegiatan edukasi juga krusial, agar informasi yang disampaikan tepat waktu dan relevan dengan isu kesehatan yang sedang berkembang.

Dengan mengelola ketiga aspek ini secara efektif, Dinas Kesehatan diharapkan dapat meningkatkan kinerja implementasi kebijakan Program Si Eling dan memberikan dampak yang lebih signifikan bagi masyarakat di Kota Bandung.

Secara keseluruhan berdasarkan wawancara dengan Ibu Nilla Avianty, S.Sos., M.K.M., sumber daya yang dimiliki Dinas Kesehatan Kota Bandung untuk Program Si Eling dinilai sudah memadai, meskipun ada ruang untuk pengembangan lebih lanjut dalam setiap aspek sumber daya.

Dalam aspek sumber daya manusia, Ibu Nilla Avianty, S.Sos., M.K.M. menekankan pentingnya kolaborasi antara Dinas Kesehatan dan puskesmas untuk melaksanakan kegiatan di sekolah-sekolah yang terpilih. Berikut adalah ringkasan dari pernyataan beliau aspek sumber daya manusia dalam program Si Eling menunjukkan bahwa kolaborasi dan komunikasi yang baik menjadi kunci dalam mencapai tujuan program secara efektif.



Ibu Nilla Avianty, S.Sos., M.K.M. menjelaskan mengenai sumber daya anggaran dan sarana prasarana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program Si Eling, dengan anggaran yang dialokasikan secara tahunan, perencanaan yang matang menjadi krusial untuk keberhasilan program Si Eling. Ketersediaan sarana prasarana yang memadai, seperti transportasi dan alat peraga, juga sangat penting untuk mendukung pelaksanaan kegiatan edukasi kesehatan secara efektif. Respons cepat terhadap isu kesehatan baru menunjukkan fleksibilitas dan komitmen Dinas Kesehatan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Aspek sumber daya waktu merupakan faktor penting yang sering terabaikan dalam perencanaan program. Perencanaan waktu harus dilakukan secara tepat dan objektif, mengingat adanya kemungkinan kejadian tak terduga. Program Si Eling telah merancang manajemen waktu dengan baik, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Nilla Avianty, S.Sos., M.K.M., yang menekankan pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan. Pada program Si Eling tahun 2022, kegiatan berlangsung intensif pada bulan September, dengan fokus pada promosi dan edukasi kesehatan di sekolah-sekolah terpilih. Ibu Nilla menyatakan bahwa manajemen waktu telah dilaksanakan dengan baik dan minim kendala. Secara keseluruhan, timeline program sesuai dengan rencana awal, dengan intensitas tinggi sebagai langkah strategis yang diambil.

Implementasi program Si Eling menghadapi berbagai tantangan dan kendala, terutama terkait sinkronisasi sumber daya manusia, sarana, dan manajemen waktu. Ibu Nilla Avianty, S.Sos., M.K.M., menjelaskan bahwa tantangan ini mempengaruhi objektivitas dalam pelaksanaan tugas. Meski intensitas kegiatan tinggi, tim berupaya memaksimalkan sumber daya untuk mencapai hasil yang bermakna. Dari perspektif pihak sekolah, Ibu Leni Agustini, S.Pd., mengemukakan bahwa tantangan terletak pada penyampaian materi yang kompleks sehingga sulit dipahami siswa SMP, terutama karena program ini hanya dilaksanakan sekali. Bapak Andreas William menambahkan bahwa urgensi isu yang dibahas perlu disesuaikan dengan kondisi terkini agar lebih relevan dan dapat dimengerti oleh siswa. Peserta didik juga memberikan pandangan positif mengenai program ini. M. Adly Atalla dan Ibnu Ibrahim menyatakan bahwa penjelasan dan alat peraga yang digunakan dalam program Si Eling sudah jelas dan informatif, yang meningkatkan antusiasme mereka terhadap materi yang diajarkan. Secara keseluruhan, meskipun terdapat tantangan dalam penyampaian substansi dan relevansi isu, program Si Eling berhasil berjalan dengan baik. Sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, dan waktu dikelola dengan efektif, terbukti dari pelaksanaan program di sekolah-sekolah terpilih dan respons positif dari siswa.

## SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program Si Eling, yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung, memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai HIV/AIDS. Namun, implementasi program ini belum optimal dalam hal jangkauan dan kesinambungan, mengakibatkan dampak yang terbatas di masyarakat. Beberapa kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya, cakupan geografis, dan tantangan manajemen waktu. Untuk meningkatkan efektivitasnya, disarankan agar program ini lebih diperluas dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

Agustina, Y., Winarno, A., & Dyan, A. (2021). Good Corporate Governance And Financial Performance On Capital Adequacy Ratio: A Reflection Of Indonesian Conventional Banking. *JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen Dan Perbankan)*, 7(2), 293–306. <https://doi.org/10.21070/jbmp.v7i2.1542>

Agustino, L. (2022). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Revisi ke-2*. ALFABETA.

Ahyar. (2020). *Buku Metode Riset Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.



- Daim, N. (2019). Urgensi Pengaturan Lembaga Negara Khusus dalam Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Konstitusi*, 16(1).
- Depkes RI. (2006). *Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia*. Depkes RI.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press.
- Humas Kota Bandung. (2022). Si Eling: Cara Pemkot Bandung Sosialisasikan Pencegahan HIV/AIDS. *Bandung.Go.Id*. <https://www.bandung.go.id/news/read/6962/si-eling-cara-pemkot-bandung-sosialisasikan-pencegahan-hiv-aids>
- Joko, W. (2021). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)*. Media Nusa Kreative.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. UNG Press.
- Labolo, M. (2017). *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya* (8th ed.). Rajawali Pers.
- Luas wilayah Kota Bandung. (2023). *Sadata Bappelitbang Kota Bandung*. Retrieved October 15, 2024, from <https://sadata.bappelitbang.bandung.go.id/berita/readlayanan/luas-wilayah>
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulgan, G. (2009). *The Art of Public Strategy - Mobilizing Power and Knowledge For the Common Good*. Oxford University Inc. <https://books.google.co.id/books?id=GZh2z6wZ-asC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Ndraha, T. (2011). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. PT RINEKA CIPTA.
- Nurcholis, H. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah* (Edisi Revisi). PT Grasindo.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit.
- Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.
- Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2021.
- Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2022.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023.



## Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2018-2023.

- Rokom. (2023). Kasus HIV dan Sifilis Meningkat, Penularan Didominasi Ibu Rumah Tangga. *Sehat Negeriku Kementerian Kesehatan*. Kementerian Kesehatan RI.
- Salusu, J. (2004). *Pengambilan Keputusan Stratejik*. Grasindo.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syafiie, I. K. (2011). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT Refika Aditama.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI.
- Taufiqurakhman. (2014). *Kebijakan Publik*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- WHO. (2020). *Constitution of the World Health Organization* edisi ke-49. In World Health Organization.